



ANALISIS DAMPAK BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF JAWA TIMUR

Meilissa Ike Dien Safitri*
Pemerintah Kota Pasuruan

Candra Fajri Ananda
Universitas Brawijaya, Malang

Ferry Prasetyia
Universitas Brawijaya, Malang

*Alamat Korespondensi:
meli_ary2805@yahoo.com

ABSTRACT

This study examines the influence of spending on economic functions, health functions and education functions as the main variables and Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita and open unemployment as control variables on the Inclusive Economic Development Index (IPEI) as a proxy for inclusive economic growth. This study uses the Panel Vector Error Correction Model (PVECM) in 38 cities/regencies in East Java during 2014-2018. The results showed that spending on economic functions, health functions, education functions, and GRDP per capita had a significant positive effect on inclusive economics growth in the long run. Meanwhile, open unemployment rate has a negative effect on inclusive economics growth. In the short term, spending on health and education functions have significant positive effects on inclusive economic growth, while spending on economic functions, GRDP per capita and open unemployment rates have no effect on inclusive economics growth. The contribution of spending on economic functions, health functions, education functions, GRDP per capita and open unemployment rates to inclusive economic growth are 47%, thus our findings indicate the role of other factors in increasing inclusive economic growth in East Java, one of which is the quality of human resources, also known as human capital.

Keyword:

Government Expenditures, Inclusive Economic Development Index, Inclusive Economic Growth, PVECM

ABSTRAK

Penelitian ini tujuannya yaitu meneliti pengaruh dari belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, dan fungsi pendidikan sebagai variabel utama serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel kontrol terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebagai proxy dari pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian ini menggunakan *Panel Vector Correction Model* (PVECM) di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur selama tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan jika belanja fungsi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada jangka panjang, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif. Pada jangka pendek, belanja fungsi kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, akan tetapi belanja fungsi ekonomi, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Kontribusi belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu sebesar 47%, sehingga temuan kami mengindikasikan adanya peran dari faktor lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur, salah satunya yaitu kualitas sumber daya manusia atau dikenal sebagai modal manusia (*human capital*).

Kata kunci:

Belanja Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, PVECM

KLASIFIKASI JEL:

E62, E63, H50

CARA MENGUTIP:

Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif jawa timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85-96.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal yaitu pemberian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyusunan perencanaan perekonomian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penduduk di daerah tersebut. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk pengalokasian anggaran salah satunya belanja pemerintah agar program pembangunan ekonomi yang sudah tersusun dapat tercapai sehingga pembangunan ekonomi di daerah terlaksana secara optimal dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif bukan hanya mengutamakan tujuan akhir pada *output* yang tumbuh saja, akan tetapi lebih pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tersebut diukur dari indikator turunnya angka pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan, serta pemerataan akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Penerapan pertumbuhan inklusif juga dilakukan oleh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Kondisi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang lebih baik daripada nasional, akan tetapi tingkat kemiskinan dan ketimpangannya juga masih tinggi. Tingkat kemiskinan Jawa Timur lebih tinggi dari rata-rata nasional (BPS, 2019) karena masih banyak penduduk miskin yang ada di daerah pedesaan di sebagian besar kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Wilayah pemerintahan daerah di kabupaten relatif lebih luas dibanding dengan pemerintahan kota. Oleh karena itu, wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Timur masih terdapat desa tertinggal yang menyebabkan kurang terjangkaunya pemerataan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi sebagian besar kota di Provinsi Jawa Timur yang tinggi. Hal ini terlihat dari sebagian besar laju pertumbuhan PDRB kota di Provinsi Jawa Timur yang lebih tinggi daripada kabupaten.

Tercapainya pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan belum maksimal dan kurang bermanfaat untuk masyarakat miskin dan masih adanya ketimpangan antar daerah di Provinsi Jawa Timur. Begitu juga ketimpangan pendapatan yang terlihat dari rasio gini yang hasilnya belum memuaskan. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur, khususnya di kabupaten/kota belum terjadi sepenuhnya. Oleh sebab itu, untuk mengetahui tingkat inklusivitas ekonomi diperlukan pengukuran menggunakan indeks pembangunan ekonomi inklusif yang ditetapkan oleh Kementerian

PENERAPAN DALAM PRAKTIK

- Penelitian ini menunjukkan pentingnya peran belanja pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Meskipun demikian, peran tersebut tidaklah besar yang mengindikasikan adanya peran penting lain seperti kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan alokasi belanja pemerintah daerah perlu diikuti dengan peningkatan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Pemerintah daerah perlu membuat program yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk mengefektifkan alokasi anggaran yang ada agar tepat sasaran. Kementerian Keuangan juga diharapkan dapat mendukung sekaligus mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan program-programnya di bidang tersebut.

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) adalah salah satu alat yang digunakan untuk memantau dan mengukur tingkat inklusivitas pembangunan di level kabupaten/kota, provinsi, dan nasional di Indonesia. IPEI terbentuk melalui 3 pilar, 8 sub pilar, dan 21 indikator (Bappenas, 2018). Pertumbuhan inklusif dapat tercapai dengan adanya peran pemerintah. Peran pemerintah tersebut dikaitkan dengan kebijakan fiskal yaitu dengan mengalokasikan anggaran secara efektif. Secara umum anggaran yang dikeluarkan pemerintah di setiap fungsi berfluktuasi setiap tahun sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Belanja pemerintah tersebut yaitu belanja pemerintah yang pro rakyat diantaranya belanja fungsi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan pada hasil. Salah satu penelitian di Nigeria menunjukkan jika belanja pendidikan mempunyai hubungan yang positif dan sangat signifikan dan belanja kesehatan pengaruhnya positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Danladi et al., 2015). Penelitian di Indonesia menemukan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh belanja pendidikan di era reformasi dan belanja kesehatan di era orde baru (Jamil, 2017). Hubungan belanja pemerintah dengan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif juga terdapat pada beberapa penelitian, di antaranya penelitian yang menjelaskan bahwa dengan menggunakan pendekatan Asian

Development Bank (ADB), indeks inklusif seluruh provinsi yang ada di Negara Indonesia capaiannya memuaskan kecuali Papua. Penggunaan metode World Economic Forum (WEF) dan United Nation Development Programme (UNDP) yaitu rendahnya capaian inklusivitas Provinsi Papua Barat dan Papua dibanding provinsi yang lain (Sitorus & Arsani, 2018). Penelitian lain juga mengemukakan bahwa belanja daerah dan faktor kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pertumbuhan yang inklusif, sedangkan faktor lain seperti pendidikan, jumlah penduduk miskin, dan pengangguran berpengaruh negatif terhadap indeks pertumbuhan inklusif (Azwar, 2016).

Dari latar belakang di atas, penulis meneliti pengaruh dari belanja pemerintah daerah yang terdiri dari belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, serta fungsi ekonomi yang ada di kota/kabupaten di Jawa Timur dengan menggunakan Model *Panel Vector Error Correction* (PVECM). Model ini bisa menggambarkan pengaruh belanja pemerintah daerah tersebut terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif pada jangka pendek dan jangka panjang serta mengetahui peramalan melalui *Impuls Respons Function* atau disebut IRF serta *Varian Decomposition*.

Adapun alasan memilih metode PVECM yaitu: (1) karakteristik data pada variabel belanja pemerintah daerah per fungsi dan data IPEI cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan data non stasioner di tingkat level; (2) terdapat hubungan IPEI dengan belanja pemerintah daerah per fungsi pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya; dan (3) terdapat variasi antar kota dan kabupaten.

STUDI LITERATUR

Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah merupakan belanja atau pengeluaran yang diperuntukkan bagi kepentingan publik dalam menumbuhkan perekonomian daerah dan meningkatkan kemampuan masyarakat. Belanja pemerintah diutamakan dalam meningkatkan dan melindungi kualitas hidup masyarakat sebagai pemenuhan yang wajib bagi daerah melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, fasilitas umum dan sosial, pelayanan dasar serta pengembangan dari jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nurmainah (2013) menyatakan peran belanja pemerintah pada negara berkembang yaitu signifikan karena terbatasnya peran swasta dalam perekonomian, karena itu dalam hal ini peran pemerintah sangat penting.

Belanja pemerintah fungsi pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.7/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjelaskan bahwa belanja pendidikan merupakan alokasi anggaran untuk pembiayaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Penetapan alokasi tersebut yaitu sekurang-kurangnya 20% dari seluruh belanja APBD. Alokasi belanja kesehatan tersirat pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa alokasi untuk kesehatan sebesar 5% di luar gaji yang berasal dari APBN, bagi pemerintah kota/kabupaten dan provinsi yaitu sebesar 10% di luar gaji yang berasal dari APBD. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.02/2011 juga menjelaskan beberapa jenis anggaran dari fungsi kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan, perbekalan kesehatan, keluarga berencana, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.

Belanja pemerintah fungsi ekonomi dalam kaitannya dengan pembangunan daerah ditujukan agar pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud. Belanja pemerintah fungsi ekonomi salah satunya adalah belanja infrastruktur. Infrastruktur memiliki tiga peran penting bagi integrasi ekonomi yaitu: pertama, ketersediaan dari infrastruktur merupakan pemicu pertumbuhan ekonomi. Kedua, jaringan infrastruktur yang tersedia sangat penting dalam kelancaran aktivitas investasi dan perdagangan. Ketiga, untuk mengatasi adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Infrastruktur yang baik mampu melancarkan mobilitas perekonomian antar wilayah/daerah sehingga mampu menarik para investor untuk melakukan investasi di daerah dan berdampak pada terciptanya kesempatan kerja dan peningkatan kondisi pembangunan. Kondisi pembangunan yang meningkat akan berdampak pada pengentasan kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Pertumbuhan yang inklusif diartikan dengan pertumbuhan yang bisa menjamin pada meratanya akses pertumbuhan, tidak diskriminatif, serta mampu untuk meminimalkan kesenjangan antar kelompok (Klasen, 2010). Konsep menurut World Bank (2014), pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu dengan memperluas akses aset perekonomian, memperluas pasar dan skala ekonomi dan mampu menciptakan pemerataan peluang untuk generasi yang akan datang.

Pertumbuhan inklusif menurut UNDP (2017) yaitu didasarkan pada pendapatan GDP dan pada

sisi produksi, dimana proses dan hasilnya terdapat partisipasi dari semua pihak dan mendapat manfaat dari pertumbuhan tersebut secara merata. Konsep lain mengenai pertumbuhan inklusif dinyatakan oleh Bappenas (2018) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan inklusif merupakan pembangunan perekonomian agar tercapai kesempatan dan akses yang luas untuk seluruh masyarakat secara adil, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan kelompok serta meningkatkan kesejahteraan.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

IPEI merupakan salah satu alat ukur untuk memantau tingkat inklusivitas pertumbuhan dan pembangunan di level kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional di Indonesia. Pengukuran inklusivitas dengan melihat aspek dari pertumbuhan ekonomi, aspek kemiskinan, ketimpangan, serta aspek kesempatan dan akses. Indeks terbentuk dari 21 indikator, 8 sub pilar, dan 3 pilar.

Indikator yang digunakan dalam pengukuran IPEI pada penelitian ini yaitu data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik serta data hasil pengolahan Susenas dan Sakernas. Penghitungan beberapa indikator pada indeks dikelompokkan dalam suatu sub pilar dan beberapa sub pilar tersebut dikelompokkan dalam suatu pilar. Oleh karena itu, diharapkan indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan dan mewakili inklusivitas suatu sub pilar dan sub pilar diharapkan dapat menggambarkan inklusivitas suatu pilar. Pada akhirnya, komposit dari seluruh pilar diharapkan dapat menggambarkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi secara nasional, provinsi ataupun kabupaten/kota.

Penelitian Terdahulu

Echekoba & Chinelo (2017) dalam penelitiannya menjelaskan jika belanja pendidikan mempunyai hubungan yang positif dan sangat signifikan, sedangkan belanja kesehatan mempunyai dampak yang positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan. Pratiwi & Ismal (2017) juga melakukan penelitian yang menjelaskan jika belanja kesehatan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan yang inklusif di Qatar dan Malaysia untuk jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan belanja pendidikan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia dan juga Arab Saudi. Gould (1983), Ram (1986), dan Danladi et al. (2015) juga melakukan penelitian yang sama dan hasilnya menunjukkan bahwa belanja pemerintah yang tinggi berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Santos, Hausmann, & Espinoza (2017) menyatakan jika ada hubungan secara kuantitas dan kualitas pendidikan terhadap pertumbuhan inklusif, serta peran pemerintah dalam pengalokasian investasi pendidikan mampu mempercepat pertumbuhan inklusif pada suatu daerah. Lain halnya dengan penelitian Nurudeen dan Usman (2010) yang menunjukkan jika belanja pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Levine, R., N. Loayza (2000) dan Pritchett (2001) juga melakukan penelitian jika tidak terdapat hubungan signifikan antara akumulasi modal fisik yaitu belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, justru pertumbuhan ekonomi tercipta dari meningkatnya modal manusia. Sidek & Asutay (2020) juga menemukan bahwa belanja pembangunan pemerintah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data IPEI pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 diperoleh dari Kementerian PPN/Bappenas. Data realisasi belanja fungsi pendidikan, ekonomi, dan kesehatan kota/kabupaten di Jawa Timur pada 2014-2018 didapat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, sedangkan data tingkat pengangguran terbuka dan PDRB per kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Definisi Operasional

Pada penelitian ini, definisi operasional dirangkum dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Keterangan
IPEI	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
PEND	Rasio realisasi belanja pemerintah fungsi pendidikan dengan jumlah penduduk
KES	Rasio realisasi belanja pemerintah fungsi kesehatan dengan jumlah penduduk
EKO	Rasio realisasi belanja pemerintah fungsi ekonomi dengan jumlah penduduk
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
PP	PDRB per kapita

Sumber: Diolah oleh penulis

Metode Analisis

Pada penelitian ini, model analisis dinamis yang digunakan yaitu uji-kointegrasi untuk melihat ada atau tidaknya hubungan keseimbangan yang terjadi pada jangka panjang dengan menggunakan Panel VECM (PVECM). Adapun tahapan dari PVECM adalah (1) Uji Stasioneritas data, (2) Menentukan Lag Optimal, (3) Pengujian Hubungan Kointegrasi, (4) Analisis PVECM, (5) *Impulse Response Function* (IRF), dan (6) *Variance Decomposition*

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model yang terlihat pada Rumus 1, dimana variabel utama yang digunakan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah fungsi pendidikan, belanja pemerintah fungsi kesehatan, belanja pemerintah fungsi ekonomi terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Jawa Timur dan variabel kontrol yang digunakan yaitu PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka. Adapun model yang terbentuk terlihat pada Rumus 1 sebagai berikut:

Rumus 1. Model Penelitian

$$\begin{bmatrix} \Delta \text{IPEI} \\ \Delta \text{PEND} \\ \Delta \text{KES} \\ \Delta \text{EKO} \\ \Delta \text{TPT} \\ \Delta \text{PP} \end{bmatrix}_{it} = \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} + \sum_{t-1}^k \tau_{it} \begin{bmatrix} \Delta \text{IPEI} \\ \Delta \text{PEND} \\ \Delta \text{KES} \\ \Delta \text{EKO} \\ \Delta \text{TPT} \\ \Delta \text{PP} \end{bmatrix}_{it} + \pi \cdot a\beta' \begin{bmatrix} \text{IPEI} \\ \text{PEND} \\ \text{KES} \\ \text{EKO} \\ \text{TPT} \\ \text{PP} \end{bmatrix}_{it-1} + \begin{bmatrix} e_0 \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \\ e_5 \end{bmatrix}$$

di mana:

- α_0 : Intersep
- $\alpha_1 - \alpha_5$: Koefisien variabel
- k : Lag
- $e_0 - e_5$: Error term
- t : Periode waktu pengamatan
- i : Lokasi pengamatan
- Γ : Hubungan jangka pendek
- β' : Keseimbangan jangka panjang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Perkembangan IPEI di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur selama tahun 2014 – 2018 terlihat pada Grafik 1. Dari grafik tersebut terlihat bahwa sebagian besar kota di Provinsi Jawa Timur memiliki IPEI yang tinggi dan paling tinggi yaitu Kota Madiun, sedangkan untuk IPEI yang terendah yaitu Kabupaten Bangkalan. Perbedaan tinggi rendahnya IPEI kabupaten dan kota di Jawa Timur tersebut disebabkan karena capaian pada indikator

pembentuk IPEI di daerah perkotaan nilainya lebih tinggi dari kabupaten.

Proses dari pembangunan ekonomi kota/kabupaten di Jawa Timur ditunjukkan oleh data tersebut yaitu IPEI yang merupakan suatu alat yang digunakan memantau dan mengukur tingkat inklusivitas pembangunan kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja dan pada akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif terjadi tidak lepas dari besar alokasi belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi dan rata-rata besarnya alokasi fungsi belanja cenderung mengalami peningkatan pada periode 2014 -2018.

Analisis Data

Analisis PVECM pada penelitian ini diolah dengan menggunakan software *E-Views* dan menghasilkan sebagai berikut.

Uji Stasioneritas Data

Hasil stasioneritas menunjukkan beberapa variabel pada penelitian yaitu IPEI, belanja fungsi pendidikan, dan belanja fungsi kesehatan non-stasioner di I(0) (tingkat level), selanjutnya seluruh variabel diuji pada level *first difference* dan menghasilkan stasioneritas dengan taraf nyata 5% dan hal tersebut merupakan syarat terpenuhinya metode PVECM. Hasil stasioneritas sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Stasioneritas

Statistik	Metode	
	ADF- Fisher	PP- Fisher
	Chi - Square	Chi - Square
IPEI	26,20	35,67
D(IPEI)	187,20*	203,49*
Eko	99,64*	119,69*
D(Eko)	173,45*	178,97*
Kes	71,30	72,23
D(Kes)	169,76*	190,65*
Pend	85,18	84,53
D(Pend)	172,88*	181,18*
PP	39,98	84,25
D(PP)	186,81*	222,44*
TPT	137,75*	156,08*
D(TPT)	222,25*	257,79*

Sumber: Diolah oleh penulis

Ket: *] Signifikansi taraf uji 5%

Penentuan Lag Optimum

Hasil uji *lag optimum* persamaan PVECM pada penelitian ini dengan variabel IPEI, Eko, Kes, Pend,

besar adalah belanja pemerintah fungsi kesehatan. Adapun hasil *impulse response* pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Variance Decomposition

Pada Tabel 6 menunjukkan hasil *variance decomposition* IPEI di tahun pertama dari IPEI dijelaskan oleh IPEI itu sendiri yaitu sebesar 100%, akan tetapi variabel lain tidak berkontribusi sama sekali. Pada tahun kedua IPEI menjelaskan dirinya sendiri sebesar 74,05%, dan untuk belanja pemerintah fungsi ekonomi sebesar 0,81%, fungsi kesehatan sebesar 21,3%, fungsi pendidikan sebesar 2,39%, PDRB per kapita sebesar 0,34%, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,08%. Pada 5 tahun yang akan datang *forecast error variance* yang dijelaskan oleh IPEI itu sendiri yaitu sebesar 2,67%, belanja pemerintah fungsi ekonomi sebesar 0,44%, fungsi kesehatan sebesar 69,21%, fungsi pendidikan sebesar 24,67%, PDRB per kapita sebesar 0,21%, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,77%. Pada akhirnya, 10 tahun yang akan datang *forecast error variance* yang dijelaskan oleh IPEI itu sendiri yaitu sebesar 0,49%, belanja pemerintah fungsi ekonomi sebesar 0,22%, fungsi kesehatan sebesar 69,09%, fungsi pendidikan sebesar 27,19%, PDRB per kapita sebesar 0,15%, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,84%. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja pemerintah fungsi kesehatan di tahun ke 5 dan tahun ke 10 memberikan kontribusi paling besar daripada lainnya.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Berdasarkan hasil analisis data dihasilkan jika belanja fungsi pendidikan pada jangka pendek dan panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif

Jawa Timur. Koefisien untuk jangka panjang belanja fungsi pendidikan sebesar 0,120. Koefisien positif menunjukkan jika belanja fungsi pendidikan naik sebesar 1% maka akan meningkatkan indeks pembangunan ekonomi inklusif sebesar 12%. Koefisien untuk jangka pendek variabel belanja pemerintah fungsi pendidikan sebesar 0,017 yang menunjukkan jika belanja fungsi pendidikan naik sebesar 1% maka akan meningkatkan indeks pembangunan ekonomi inklusif sebesar 1%.

Dari hasil analisis data tersebut maka bisa dikatakan jika belanja pemerintah fungsi pendidikan memiliki pengaruh terhadap pembangunan ekonomi inklusif pada jangka pendek dan panjang. Analisis data belanja fungsi pendidikan tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif, dimana indeks tersebut merupakan alat ukur sejauh mana tingkat inklusivitas dari pertumbuhan ekonomi inklusif kota/kabupaten di Jawa Timur pada penelitian ini. Belanja pemerintah fungsi pendidikan yang meningkat menyebabkan tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif (Echekoba & Chinelo, 2017). Pratiwi dan Ismal (2017), Hur (2014), Jamil (2017), Sasmal dan Sasmal (2016) dan Sidek dan Asutay (2020) menyebutkan bahwa belanja pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan inklusif dan selaras dengan penelitian Danladi et al. (2015), Gould (1983) dan Ram (1986) yang menyebutkan bahwa belanja pemerintah yang tinggi berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah jika dikaitkan dengan teori dan hasil penelitian mempunyai hubungan yaitu mendukung teori "Keynes" dimana pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah memiliki hubungan positif. Hal ini diuraikan panjang lebar oleh Keynes dalam *The General Theory Keynes* yang menjelaskan bahwa belanja pemerintah memacu pertumbuhan

Tabel 5. *Impulse response* IPEI 10 tahun

Periode	IPEI	Eko	Kes	Pend	PP	TPT
1	0,066	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	0,077	0,010	0,054	0,018	0,006	-0,012
3	0,122	0,022	0,194	0,127	0,016	-0,045
4	0,164	0,058	0,619	0,341	0,038	-0,123
5	0,259	0,125	1,635	0,985	0,088	-0,326
6	0,472	0,271	4,222	2,572	0,207	-0,839
7	1,010	0,646	10,617	6,586	0,507	-2,136
8	2,339	1,541	26,594	16,615	1,249	-5,377
9	5,680	3,795	66,463	41,659	3,111	-13,47
10	14,03	9,402	166,03	104,20	7,756	-33,68

Cholesky Ordering: IPEI Eko Kes Pend PP TPT

Sumber: Diolah oleh penulis

ekonomi. Keynes menerangkan jika belanja pemerintah meningkat dapat mendorong meningkatnya permintaan agregat yang diikuti oleh meningkatnya produksi dari barang dan jasa sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Belanja pemerintah dalam hal ini dipandang sebagai kekuatan eksogenus yang mengubah *output* agregat.

Pada jangka panjang, belanja fungsi pendidikan merupakan investasi yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih inklusif. Pendidikan merupakan bagian dari *public service* dari negara untuk masyarakatnya. Dengan adanya hal ini, pemerintah sadar akan pentingnya peran pendidikan sebagai kekuatan utama demi kemajuan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Oleh karena itu, belanja fungsi pendidikan dianggarkan paling tinggi daripada belanja yang lain. Namun perlu waktu yang cukup agar tercapai pendidikan yang layak dan mampu bersaing.

Pemerintah lebih memfokuskan pada kebijakan wajib belajar 12 tahun yang merupakan program pemerintah dan tercantum pada RPJMD 2014-2019. Meier & Rauch (2000) menjelaskan tentang belanja pemerintah yang tinggi di sektor pendidikan akan mempengaruhi perkembangan pendidikan yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah murid yang menyelesaikan sekolah. Hal tersebut ternyata terkait dengan sub pilar dari indeks pembangunan ekonomi inklusif yaitu angka harapan lama sekolah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Belanja pemerintah fungsi pendidikan dalam jangka panjang sebaiknya mengarah pada kualitas belanja yang mengutamakan peningkatan kualitas guru, siswa, dan kurikulum, serta proses belajar mengajar secara keseluruhan. Tidak hanya fokus pada belanja fisik saja seperti gedung atau alat, akan tetapi juga pada kurikulumnya sehingga dapat meningkatkan kualitas siswa dan gurunya. Adanya

SDM yang berkualitas maka tinggi pula kesejahteraan dan pembangunannya dan pada akhirnya berdampak pada pencapaian pembangunan ekonomi inklusif yang lebih optimal.

Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Berdasar hasil analisis data, belanja pemerintah fungsi kesehatan pada jangka panjang dan pendek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif kab/kota Jawa Timur. Pada jangka panjang, nilai koefisien dari belanja fungsi kesehatan sebesar 0,020. Positif pada nilai koefisien menjelaskan jika terdapat kenaikan belanja fungsi kesehatan sebesar 1% menyebabkan peningkatan indeks pembangunan ekonomi inklusif sebesar 2%. Nilai koefisien pada jangka pendek variabel belanja pemerintah fungsi kesehatan sebesar 0,026. Positifnya koefisien menjelaskan jika belanja fungsi kesehatan naik 1% maka berdampak pada peningkatan indeks pembangunan ekonomi inklusif 2%.

Dari hasil analisis data tersebut maka bisa dikatakan jika belanja pemerintah fungsi kesehatan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Analisis data belanja fungsi kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif, dimana indeks tersebut merupakan alat ukur sejauh mana tingkat inklusivitas pertumbuhan ekonomi yang ada di kota/kabupaten di Jawa Timur. Meningkatnya belanja pemerintah fungsi kesehatan berdampak pada tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif. Kolawole (2016), Echekoba dan Chinelo (2017), Sasmal dan Sasmal (2016), Azwar (2016), Hur (2014), Jamil (2017) dan Sidek dan Asutay (2020) juga menyebutkan bahwa belanja kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

Tabel 6. Variance decomposition IPEI 10 tahun

Periode	S.E.	IPEI	Eko	Kes	Pend	LPP	TPT
1	0,066	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	0,119	74,050	0,815	21,307	2,399	0,341	1,085
3	0,293	29,678	0,739	47,550	19,117	0,377	2,536
4	0,795	8,286	0,640	66,983	21,042	0,288	2,758
5	2,116	2,674	0,442	69,214	24,675	0,216	2,776
6	5,474	1,145	0,311	69,830	25,769	0,175	2,767
7	13,869	0,709	0,266	69,490	26,567	0,161	2,805
8	34,842	0,563	0,237	69,269	26,948	0,154	2,826
9	87,205	0,514	0,227	69,145	27,123	0,151	2,837
10	217,968	0,496	0,222	69,090	27,197	0,150	2,842

Cholesky Ordering: IPEI Eko Kes Pend PP TPT

Sumber: Diolah oleh penulis

Meier & Rauch (2000) mengemukakan bahwa suatu negara harus meningkatkan investasi pada bidang kesehatan guna tercapainya pertumbuhan. Belanja pemerintah fungsi kesehatan memberikan peran penting untuk mencapai kualitas SDM yang lebih produktif. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 menyatakan jika pembangunan bidang kesehatan tujuannya agar adanya peningkatan kemauan, kemampuan, dan kesadaran untuk hidup sehat pada masing-masing individu supaya tercipta derajat kesehatan yang tinggi.

Dinas Kesehatan Jawa Timur (2018) juga menerangkan bahwa sarana dan prasarana untuk masyarakat sangat memadai. Hal tersebut didukung melalui Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang merupakan upaya yang diselenggarakan, dikelola bersama dan oleh rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Posyandu adalah salah satu bagian dari UKBM dalam meningkatkan tumbuh dan kembang bayi serta balita, kesehatan ibu hamil dan menyusui, serta wanita dengan usia subur. Hal tersebut jika dikaitkan dengan sub pilar dari indeks pembangunan ekonomi inklusif yaitu meningkatnya persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar, berarti bisa dikatakan jika belanja pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kesehatan merupakan investasi jangka panjang dan negara sadar akan pentingnya peran kesehatan sebagai kekuatan utama untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi, salah satunya adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN merupakan salah satu wujud dari jaminan sosial nasional yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Hal tersebut jika dikaitkan dengan sub pilar dari indeks pembangunan ekonomi inklusif yaitu terlihat dari angka persentase jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan yang setiap tahunnya meningkat. Semakin tinggi masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan khususnya masyarakat miskin, maka terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Belanja pemerintah fungsi kesehatan dalam jangka panjang sebaiknya diarahkan pada kualitas belanja dalam meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan fasilitas alat kesehatan yang memadai. Adapun yang harus dilakukan pemerintah agar tercapainya pengaruh belanja pemerintah fungsi kesehatan terhadap pembangunan inklusif dalam jangka panjang diantaranya: (1) Kualitas belanja untuk penguatan program generasi unggul melalui pelatihan bagi tenaga medis dan (2) Kualitas belanja untuk

memperbaiki mutu pelayanan dan efektivitas dari JKN, penyesuaian dan validitas data agar tepat sasaran.

Dari implikasi tersebut diharapkan supaya sistem kesehatan nasional menjadi baik sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi tinggi. Kesejahteraan masyarakat yang tinggi akan berdampak pada produktivitas masyarakat yang tinggi, sehingga akan tercapai pembangunan inklusif secara optimal dalam jangka panjang.

Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Berdasarkan hasil analisis data, belanja pemerintah fungsi ekonomi dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPEI, namun dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif. Pada jangka panjang nilai koefisien untuk variabel belanja pemerintah fungsi ekonomi sebesar 0,100 artinya apabila belanja ekonomi naik 1% akan berdampak pada peningkatan indeks pembangunan ekonomi inklusif 10%.

Pada jangka pendek, belanja fungsi ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan sesuai penelitian (Ramadhan & Setiadi, 2019) yang menerangkan jika belanja fungsi ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi di Indonesia. Belanja fungsi ekonomi ini salah satunya yaitu infrastruktur. Pada jangka panjang, belanja fungsi ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan, karena terlihat bahwa infrastruktur tidak hanya dirasakan langsung pada waktu infrastruktur itu dibuat tetapi dampaknya akan terlihat dalam jangka panjang.

Pembangunan infrastruktur tersebut pasti membutuhkan banyak tenaga kerja dan dengan terbukanya lapangan pekerjaan akan berdampak pada tingkat produktivitas yang tinggi dan menurunnya angka kemiskinan sehingga pada akhirnya tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Adanya infrastruktur menyebabkan distribusi ekonomi berjalan secara optimal, sehingga perekonomian berjalan lancar dan pembangunan ekonomi akan tinggi. Sejalan dengan penelitian Buhr (2003) yang menyatakan jika infrastruktur adalah syarat dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Torrisi (2009) juga menjelaskan jika penggerak roda perekonomian salah satunya yaitu infrastruktur. Infrastruktur mempunyai peran penting sebagai penggerak roda perekonomian guna tercapai kesejahteraan masyarakat. Apabila kesejahteraan tercapai maka pembangunan ekonomi inklusif akan tercapai.

Selain itu, belanja fungsi ekonomi ini juga dikaitkan pada UMKM yaitu dimana terdapat asas pemberdayaan di dalamnya. Pemberdayaan tersebut menciptakan adanya pemerataan dan berdampak pada tercapainya pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian terdahulu dari Kolawole (2016), Sidek dan Asutay (2020) serta Sasmal dan Sasmal (2016) menunjukkan bahwa variabel belanja fungsi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif. Pada teori "Wagner" juga menjelaskan bahwa besarnya belanja pemerintah dan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang positif dalam pembangunan infrastruktur. Belanja pemerintah fungsi ekonomi dalam jangka panjang sebaiknya diarahkan pada kualitas belanja untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerintah sebaiknya mendukung penguatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, serta kualitas belanja untuk peningkatan kualitas alokasi belanja fungsi ekonomi pada program KUR (Kredit Usaha Rakyat).

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah fungsi kesehatan dan pendidikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi inklusif yang di-proxy dari indeks pembangunan ekonomi inklusif dalam jangka panjang ataupun jangka pendek di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Pendidikan dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang dan negara sadar akan pentingnya peran pendidikan dan kesehatan sebagai kekuatan utama untuk kemajuan pembangunan ekonomi, akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Belanja pemerintah fungsi ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif yang di-proxy dari indeks pembangunan ekonomi inklusif pada jangka panjang, dalam hal ini fungsi ekonomi salah satunya adalah infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan penunjang dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika terdapat mobilitas yang baik dan hambatan yang minim. Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat guna tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif, akan tetapi dalam jangka pendek belanja pemerintah fungsi ekonomi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Kontribusi belanja pemerintah ekonomi, belanja fungsi kesehatan, belanja fungsi pendidikan, PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif tidak begitu besar, maka dapat diindikasikan ada peran dari faktor lain untuk meningkatkan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa

Timur, salah satunya yaitu kualitas sumber daya manusia atau dikenal sebagai modal manusia (*human capital*) yang bisa dilihat dari angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup. Selain itu, dapat menjadi masukan pada penelitian selanjutnya agar memasukkan variabel yang berbeda dari penelitian ini dan menggunakan pendekatan kualitatif.

Agar tercapai pertumbuhan ekonomi inklusif secara optimal pada jangka panjang dan pendek, maka diharapkan pemerintah melakukan peningkatan kualitas belanja tidak hanya mengedepankan pembangunan fisik saja, akan tetapi juga mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, karena dampaknya akan lebih besar dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif. Desentralisasi fiskal didesain agar pemerintah mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan dari daerahnya masing-masing sehingga pemerintah daerah bisa merealisasikan belanja sesuai kebutuhan daerahnya dan adanya pengendalian atau kontrol dalam penyaluran belanja publik tersebut agar tepat sasaran. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pengalokasian belanja yang berkualitas atas program prioritas yang tepat sasaran di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur. Tiap kabupaten/kota lebih tahu akan kebutuhan dan kondisi daerahnya masing-masing sehingga bisa mengoptimalkan pengalokasian kualitas belanja tersebut pada program prioritas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mendorong tercapai dan terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif.

REFERENSI

- Azwar. (2016). Pertumbuhan inklusif di provinsi sulawesi selatan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 9, 216-242. Retrieved from <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbpk/article/view/128>
- Badan Pusat Statistik. (2019). Perkembangan beberapa indikator utama sosial ekonomi provinsi Jawa Timur. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Bappenas. (2018). Indeks pembangunan inklusif. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Buhr, W. (2003). *What is infrastructure?* (No. Discussion Paper No 10703).

- Danladi, J. D., Akomolafe, K. J., Olarinde, O. S., & Anyadiegwu, N. L. (2015). Government expenditure and its implication for economic growth: Evidence from Nigeria. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 6(18), 142-151.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (2018). *Profil kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017*. Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- Echekoba, F. N., & Chinelo, A. I. (2017). The impact of government expenditure on Nigeria economic growth: a further disaggregated approach. *NG-Journal of Social Development*, 6(3), 34-48. <https://doi.org/10.12816/0038069>
- Gould, F. (1983). The development of public expenditures in western industrialized countries: a comparative analysis. *Public Finance*, 38 (1), 38-69.
- Jamil, H. (2017). *Implikasi kebijakan fiskal era orde baru dan era reformasi dalam mewujudkan pertumbuhan inklusif di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 5(2).
- Klasen, S. (2010). Measuring and monitoring inclusive growth in developing and advanced economies: Multiple definitions, open questions and some constructive proposals. *Reframing Global Social Policy: Social Investment for Sustainable and Inclusive Growth*, (12), 123-144. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781447332497.003.0006>
- Levine, R., N. Loayza, & T. B. (2000). Financial intermediation and growth: causality and causes. *Journal of Monetary Economics*, 1.
- Meier, G. M. & Rauch, J.E. (2000). *Leading issues in economic development* (Seventh Ed). New York: Oxford University Press.
- Nurmainah, S. (2013). Analisis pengaruh belanja modal pemerintah daerah, tenaga kerja terserap dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 20, 131-141. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nurudeen, A., & Usman, A. (2010). Government expenditure and economic growth In Nigeria, 1970-2008: a disaggregated analysis. *Business and Economics Journal*, 1(1), 1-11.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran. Jakarta.
- Pratiwi, I. E., & Ismal, R. (2017). Analisis dampak kebijakan fiskal dan sasaran akhir kebijakan moneter terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia, Malaysia, Qatar dan Saudi Arabia. *Middle East and Islamic Studies*, 4(1).
- Pritchett, J. B. (2001). Quantitative estimates of the United States interregional slave trade, 1820-1860. *The Journal Of Economic History*, 61(2).
- Ram, R. (1986). Government size and economic growth: a new framework and some evidence from cross section and time series data. *American Economic Review*, 76(1), 191-203.
- Ramadhan, R. R., & Setiadi, Y. (2019). Pengaruh modal fisik dan sumber daya manusia terhadap indeks inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 109-124. <https://doi.org/10.29259/jep.v17i2.9797>
- Santos, M. A., Hausmann, R., & Espinoza, L. (2017). Shifting gears: a growth diagnostic of Panama. *SSRN Electronic Journal*, (January). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2880654>
- Sidek, N. Z. M., & Asutay, M. (2020). Do government expenditures and institutions drive growth? Evidence from developed and developing economies. *Studies in Economics and Finance*, 38(2), 400-440. <https://doi.org/10.1108/SEF-10-2019-0412>
- Sitorus, A. V. Y., & Arsani, A. M. (2018). Komparasi pertumbuhan ekonomi inklusif di 33 provinsi Indonesia tahun 2010- 2015: studi kasus menggunakan metode pendekatan ADB, WEF, dan UNDP. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 2(1), 64-77.
- Torrissi, G. (2009). *Public infrastructure: definition, classification and measurement issues, economics, management, and financial markets*. Washington DC: George Washington University.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. Jakarta.
- UNDP. (2017). *UNDP's Strategy for Inclusive and Sustainable Growth*. New York: UNDP.
- World Bank. (2014). Indonesia: menghindari perangkap. *The World Bank Office Jakarta*.

Lampiran 1. Estimasi PVECM

Jangka Panjang		Jangka Pendek	
IPEI (-1)	1,000	CointEq1	0,084
Eko (-1)	0,100 [1,777]*	D(IPEI(-1))	0,296 [1,031]
Kes (-1)	0,020 [1,758]*	D(IPEI(-2))	0,542 [1,719]*
Pend (-1)	0,120 [4,579]*	D(IPEI(-3))	-0,177 [-1,004]
PP (-1)	0,175 [4,035]*	D(Eko(-1))	-0,005 [-0,206]
TPT (-1)	-0,164 [-6,795]*	D(Eko(-2))	-0,011 [-0,822]
C	3,268	D(Eko(-3))	-0,019 [-0,471]
R-squared	0,746	D(Kes(-1))	-0,031 [-2,632]*
Adj R-squared	0,478	D(Kes(-2))	0,026 [2,232]*
Sum sq-resids	0,080	D(Kes(-3))	-0,047 [-1,828]*
SE-equation	0,066	D(Pend(-1))	0,007 [0,755]
F-statistic	2,787	D(Pend(-2))	-0,012 [-1,811]*
		D(Pend(-3))	0,017 [1,744]*
		D(PP(-1))	-3,363 [-1,280]
		D(PP(-2))	3,626 [1,079]
		D(PP(-3))	0,951 [0,725]
		D(TPT(-1))	-0,013 [-0,859]
		D(TPT(-2))	-0,024 [-0,901]
		D(TPT(-3))	-0,012 [-0,859]
		C	0,033

Angka dalam [] menyatakan nilai *t-Statistic*.
 Nilai kritis *t-Student* 5% = 1.65 dan; 10% = 1.28
 *) Signifikan dalam taraf 5 %.
 **) Signifikan dalam taraf 10 %.

Sumber: Diolah oleh penulis